



KR GROUP  
http://www.krjogja.com

# Kedaulatan Rakyat

Suara Hati Nurani Rakyat

Terbit Sejak 27 September 1945



BERLANGGANAN  
SCAN BARCODE



SELASA LEGI

5 MARET 2024 (23 RUWAH 1957 / TAHUN LXXIX NO 154)

HARGA RP 4.000 / 16 HALAMAN



Kalor-Badan Geologi

KR-BPPTKG

Luncuran awan panas guguran Gunung Merapi yang terjadi Senin (4/3/2024) pukul 16.03 WIB.

TERJAUH 2.600 METER

## Merapi Luncurkan Rentetan Awan Panas

**YOGYA (KR)** - Gunung Merapi teramati mengeluarkan delapan kali (rentetan) awan panas guguran, Senin (4/3). Yakni pukul 16.03, 16.18, 16.22, 16.24, 16.27, 16.29, 16.32 dan 18.37 WIB. Jarak luncur terjauh mencapai 2.600 meter ke arah Barat Daya. Saat terjadi awan panas guguran, arah angin ke Timur.

Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Agus Budi Santoso menuturkan, saat terjadinya awan panas guguran, visual Gunung Merapi berkabut. "Masyarakat diimbau untuk menjauhi daerah bahaya yang

direkomendasikan," katanya.

Selain itu, mulai pukul 13.41 WIB terjadi hujan di lereng Barat Daya Merapi dengan intensitas curah hujan 58,1p mm/jam. Total curah hujan 36,3 mm. "Masyarakat diimbau waspada bahaya lahar di sungai-sungai yang berhulu di Gunung Merapi," ujar Agus Budi.

Berdasarkan hasil pengamatan visual dan instrumental, disimpulkan bahwa aktivitas vulkanik Gunung Merapi masih cukup tinggi berupa aktivitas erupsi efusif. Status Gunung Merapi masih dalam tingkat Siaga. Potensi bahaya saat ini berupa

guguran lava dan awan panas guguran pada sektor Selatan-Barat Daya meliputi Sungai Boyong sejauh maksimal 5 km, Sungai Bedog, Krasak, Bebeng sejauh maksimal 7 km. Pada sektor Tenggara meliputi Sungai Woro sejauh maksimal 3 km dan Sungai Gendol 5 km.

Sedangkan lontaran material vulkanik bila terjadi letusan eksplosif dapat menjangkau radius 3 km dari puncak. Data pemantauan menunjukkan suplai magma masih berlangsung yang dapat memicu terjadinya awan panas guguran di dalam daerah potensi bahaya. (Dev)-d

## PPP Curigai Ada Kecurangan Bawaslu Kompilasi Perbedaan Suara PSI

**JAKARTA (KR)** - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI tengah mengompilasi laporan terkait dengan perbedaan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dengan foto dokumen formulir Model C Hasil Plano.

"Saat ini kami masih menunggu dari bawah. Informasi yang masuk kepada kami banyak, sehingga dalam konteks ini Bawaslu mengompilasi seluruh masukan," kata anggota Bawaslu Lolly Suheny di Gedung KPU RI, Jakarta, Senin (4/3).

Lolly menjelaskan, Bawaslu juga telah berkoordinasi dengan jajaran di bawah untuk melakukan pencermatan soal rekapitulasi berjenjang yang sedang berjalan saat ini. "Kami langsung turun lagi ke bawah untuk mencermati baik yang di kabupaten/kota atau yang sudah

masuk provinsi, termasuk kami sendiri mengompilasi supaya nanti begitu rekap nasional kami punya dokumen untuk melihat lagi," ujarnya.

Pihaknya akan terus melakukan koreksi, termasuk dari tingkat kecamatan bila ada temuan kesalahan. Ia menegaskan, proses koreksi itu pasti ada. Kalau ada kesalahan di tempat pemungutan suara (TPS), mekanisme koreksinya di kecamatan saat rekap.

"Begitu di kecamatan ada kesalahan proses rekapnya, ya, di kabupaten. Begitu sampai ke atas, se-

hingga kalau ada dugaan ini, itu, bagi Bawaslu yang harus kami lihat adalah dokumennya," tuturnya.

Sebelumnya, pengguna akun media sosial X, @overgassedmk12, mencait soal perbedaan suara PSI di Sirekap dan foto dokumen formulir Model C Hasil Plano pada hari Sabtu (2/3) pukul 16.11 WIB.

"Karena banyak yang menemukan kejangalan suara PSI, akhirnya aku mencoba cari sendiri di sekitaran Daerah Istimewa Yogyakarta. TPS 020 Wonosari Gunungkidul, DIY Web KPU: 31 C Hasil: 5," isi cuitan tersebut.

Cuitan itu hingga Minggu (3/3) pukul 16.40 WIB telah disukai 11.000 akun, diikuti 5.000 akun dan mencapai impresi sebanyak 892.300 tayangan.

\* Bersambung hal 7 kol 1



## Analisis Suara Rakyat

Dr Aprinus Salam

**HAL** yang cukup banyak diulang, apalagi dalam suasana politik, adalah pernyataan suara rakyat adalah suara Tuhan (*vox populi vox dei*). Karena suara Tuhan, banyak kepentingan memanfaatkan dan meminta dukungan rakyat. Persoalannya, apakah semua warga negara dapat disebut sebagai rakyat. Sebelum mendiskusikan hal tersebut, perlu suatu kriteria apa yang disebut sebagai suara rakyat yang suara Tuhan tersebut.

Secara umum, *pertama*, rakyat itu tidak memiliki akses terhadap institusi politik. Dengan demikian, seorang yang bagian dan terkoneksi dalam berbagai kepentingan politik dan institusi politik, maka dia bukan rakyat. Tapi lebih sebagai seorang warga negara partisan.

*Kedua*, seorang rakyat bekerja, baik secara mandiri maupun terikat dengan institusi yang beragam dan berbeda. Akan tetapi, upah kerjanya biasanya hanya cukup untuk makan dan secara relatif tidak memiliki tabungan yang memadai. Seorang rakyat tahu hidupnya pas-pasan sehingga tidak memiliki keberanian untuk aneh-aneh yang menyebabkan hidup mereka tidak aman dan tidak nyaman.

\* Bersambung hal 7 kol 1

JADWAL SALAT	Zuhur	Asar	Magrib	Isya	Subuh
	11:53	14:57	18:00	19:09	04:28

Selasa, 5 Maret 2024 Sumber: Kementerian Agama Kanwil Provinsi DIY

## ANGGOTA GEGANA TERLUKA Ledakan di Makobrimob Gegerkan Warga

**SURABAYA (KR)** - Ledakan dahsyat yang bersumber dari Kantor Subden Jibom Detasemen Gegana Satbrimob Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur di Surabaya, Senin (4/3) sekitar pukul 10.19 WIB membuat geger warga sekitar. Akibat ledakan yang suaranya terdengar hingga radius 3 kilometer tersebut, sejumlah anggota Gegana terluka. Namun tidak ada korban jiwa akibat ledakan yang menghancurkan sejumlah bangunan di dalam kompleks tersebut.

Usai ledakan yang pertama, warga di Jalan Gresik Surabaya kembali mendengar bunyi ledakan susulan yang diduga berasal dari sekitaran lokasi. Ledakan susulan yang terjadi sekitar pukul 13.10 WIB membuat masyarakat di dekat lokasi menjadi panik, termasuk para pedagang yang sedang beraktivitas di Sentra Wisata Kuliner (SWK) Krembangan. "Astaghfirullah apa itu, apa itu," kata seorang pedagang di SWK Krembangan bernama Hartati.

Pantauan di lokasi, area Subden Jibom Detasemen Gegana Satbrimob Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur dijaga ketat oleh petugas kepolisian. Kemudian, di sisi selatan lokasi terpasang garis polisi. Nampak pula empat petugas dari Inafis keluar dari Kantor Subden Jibom Detasemen Gegana Satbrimob Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur sembari menggotong kotak berwarna jingga. Salah satu di antaranya membawa tas berwarna hitam.

\* Bersambung hal 7 kol 1

## KOMISI X MINTA KEMENDIKBUDRISTEK Bentuk Satgas Cegah Perundungan

**JAKARTA (KR)** - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) diminta turun tangan dengan membentuk satuan tugas (satgas) khusus yang bertugas mencegah terjadinya perundungan. Sementara pihak sekolah didorong berkolaborasi dengan orangtua untuk lebih peka terhadap kondisi anak. Dengan demikian, mereka dapat mendeteksi apabila anak mengalami perundungan.

"Selama ini kan regulasi menyerahkan (pembentukan satgas) mengatasi kekerasan di sekolah) kepada sekolah, sekolah harus ini, ini, ini. Ketika ada persoalan, langsung didorong menjadi bagian dari kewenangan aparat penegak hukum (APH)," kata Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda di Jakarta, Senin (4/3).

Hal senada disampaikan Anggota Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah. Menurutnya, pembentukan satgas untuk mencegah perundungan sudah sepatutnya dilakukan guna mengoptimalkan pencegahan terjadinya perundungan di sekolah.



KR-Antara/Melalusa Susstira K Syaiful Huda

Setelah pembentukan satgas tersebut, para pelaku perundungan harus ditindak secara tegas melalui pemberian sanksi hukum guna memberikan efek jera. "Jangan lagi ada jalan-jalan lain di luar sanksi hukum, yang tidak menimbulkan efek jera. Sanksi hukum pertama harus," ujarnya.

Sejauh ini, Kemendikbudristek mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Peraturan itu mengamatkan satuan pendidikan untuk membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) serta pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas).

TPPK dan Satuan Tugas perlu dibentuk dalam waktu 6 sampai 12 bulan setelah peraturan ini disahkan agar kekerasan di satuan pendidikan dapat segera tertangani.

\* Bersambung hal 7 kol 5

## PROGRAM MAKAN SIANG GRATIS Jangan Gunakan Dana BOS

**JAKARTA (KR)** - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) meminta pemerintah agar pelaksanaan program makan siang gratis nantinya tak menggunakan anggaran pendidikan termasuk dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

"P2G tegas menolak, jika rencana kebijakan makan siang gratis menggunakan dana BOS," ujar Kepala Bidang Advokasi Guru P2G Iman Zanatul Haeri dalam keterangan di Jakarta, kemarin.

Iman menjelaskan program tersebut tidak boleh direalisasikan melalui penggunaan anggaran pos pendidikan lantaran sebagian besar dana BOS selama ini digunakan untuk membayar gaji guru dan tenaga pendidik honorer.

Menurut P2G, saat ini saja anggaran APBN pos pendidikan belum sepenuhnya memenuhi kesejahteraan guru dan memperbaiki fasilitas sekolah termasuk memajukan kualitas pendidikan. Apabila anggaran pendidikan dalam APBN juga digunakan untuk membiayai program makan gratis dikhawatirkan semakin menghambat peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan sebanyak 60,6 persen ruang kelas pada sekolah jenjang Sekolah Dasar (SD) dalam kondisi rusak pada tahun ajaran 2021/2022, sehingga seharusnya permasalahan ini yang menjadi fokus perhatian pemerintah.

Tak hanya itu, Iman menuturkan, banyak SD yang mengeluhkan, dana BOS untuk siswa kurang karena peranak setiap tahun hanya mendapat Rp 900 ribu atau perhari sekitar Rp 2.830.

\* Bersambung hal 7 kol 5

DI SRAGEN, TIGA WARGA TEWAS TERTIMBUN

## Longsor Terjang Dua Dusun di Karanganyar

dirawat jalan. Kepala Pelaksana Harian BPBD Karanganyar Hendro Prayitno menga-

takan, longsor di dua dusun itu menerjang pada Minggu sekitar pukul 19.00 WIB saat warga

berada di dalam rumah. "Para korban semuanya tertimpa bangunan. Tanah labil di sana. Bukan

pertama kali longsor. Kemarin hujan deras sehari-an," katanya.

\* Bersambung hal 7 kol 5



Longsor tebing menerjang permukiman di Jenawi, Karanganyar.

KR-Abdul Alim

**SUNGGUH SUNGGUH TERJADI**

● PADA hari libur, saya bersama anak dan dua keponakan piknik naik KRL ke Yogyakarta. Kami naik bus Trans Jateng dari Gemolong ke Terminal Tirtanadi, kemudian naik bus Trans Jateng ke Stasiun Balapan. Petugas tiket bertanya jumlah penumpang, saya jawab dengan pede, "Empat orang, tiga pelajar." Ia menjawab, "Ongkos pelajar hanya berlaku pada hari sekolah, Bu." (Endang Sri Sulistiya, Poncol 004/001 Pulutan, Nogosari Boyolali)-d